

POLITIK EKSTRAKTIF DALAM KEBIJAKAN PANGAN

Sebuah Perspektif Ekonomi Politik

*Abdul Aziz SR**

aaziz_sr@yahoo.com

Abstract

This research focused on political-economy perspective of food policy in the era Joko-JK governance. The government of Joko Widodo-Jusuf Kalla, from the beginning promised improvements in food self-sufficiency sovereignty. Food sovereignty is contained in the RPJMN 2015-2019 on Food and Agriculture. This study aims to provide an evaluation and analyze from a political-economic perspective to what extent food policy has improved or just the opposite. This research method is descriptive qualitative uses theory of extractive economic political institutions. The results of this study concludes that the government's extractive institutional policy patterns exist in the Jokowi-JK era in the field of food policy. The food self-sufficiency of the Joko-JK regime has never materialized, partly due to poor planning as well as the lack of seriousness of the government to build self-sufficiency in the food sector.

Keywords: Food Policy, Joko-JK, Political Economy Perspective, Extractive Politics

Pendahuluan

Sulit membayangkan suatu kehidupan manusia tanpa bahan pangan. Itulah salah satu sebab mengapa bidang pangan menjadi rebutan dalam kegiatan investasi serta ekspor-impor. Studi Hiscock¹, misalnya, melihat bahwa barang-barang berbasis pangan (selain yang berbasis air, energi, dan logam) saat ini semakin menjadi incaran dari sejumlah negara di dunia untuk dikuasainya, juga menjadi sumber konflik antarnegara, serta menjadi pusat kegiatan investasi bagi perusahaan-perusahaan multinasional (*multinational corporations*).

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (selanjutnya rezim Joko-JK), sejak awal menjanjikan sesuatu yang (kelak) lebih baik dalam menyediakan bahan pangan bagi rakyat. Melalui dokumen Nawacita-nya, Joko-JK menegaskan prioritas pembangunan yang hendak dilakukan. Pada poin ketujuh dikatakan: “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”. Poin inilah yang menjadi “induk” dari kebijakan pangan rezim pemerintahan Joko-JK.²

Menyadari pentingnya urusan dan kebutuhan pangan, pemerintah merancang sejumlah agenda yang dihayatkan agar bahan pangan – dalam berbagai jenisnya – selalu tersedia. Ada kekhawatiran bahwa stabilitas politik dan sosial dapat terganggu jika bahan pangan mengalami kelangkaan. Untuk itu, berbagai cara ditempuh pemerintah agar bahan pangan selalu tersedia di pasaran; bisa dengan meningkatkan produksi pangan dalam negeri, bisa pula dengan mengimpor bahan

* Dosen Ekonomi Politik FISIP Universitas Brawijaya, dan *Senior Researcher* pada Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP Universitas Indonesia.

¹ Lihat, Geoff Hiscock. 2012. *Earth Wars: The Battle For Global Resources*. Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd., hlm. 1-3.

² Lihat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2015. *Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian*. Jakarta: Kemenko Perekonomian, hlm. 12-13.

pangan. Kebijakan impor tersebut kemudian dipertanyakan banyak pihak; mengapa pemerintah mesti melakukan impor?

Kebijakan impor pangan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga persoalan politik. Dalam konteks ini, pangan (*food*) bukan sekadar barang (ekonomi) yang diproduksi massal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, melainkan juga menjadi wujud kepentingan dalam konteks politik. Dimensi non-ekonomi (yakni politik) muncul ketika pangan dirumuskan sebagai kebijakan negara, dan pangan pun menjadi bagian dari persoalan politik.

Tulisan ini membahas dua pertanyaan pokok, pertama, bagaimana potret kebijakan pangan rezim Joko-JK dan implementasinya dalam tiga tahun terakhir? Kedua, siapa (aktor) yang berperan penting serta lebih mengambil keuntungan dari kebijakan impor pangan dan apakah terjadi pola-pola politik ekstraktif di dalamnya?

Tulisan ini bertujuan memotret dan memahami sosok kebijakan pangan pemerintah Joko-JK dalam tiga terakhir dengan lebih melihat pada pola-pola politik interaktif di dalamnya. Adapun lingkup tulisan ini adalah studi ekonomi politik (*political economy*), artinya memandang kebijakan ekonomi (pangan) dari aspek non-ekonomi yakni aspek politiknya.

Perspektif Teori

Pada saat menjelaskan soal asal-usul kekuasaan, kemakmuran, dan kemiskinan dalam konteks negara-negara gagal (*nations fail*), dua ahli ekonomi politik Acemoglu dan Robinson mengajukan tesis yang mereka sebut “*extractive political and economic institutions*” (institusi-institusi politik dan ekonomi ekstraktif, selanjutnya disingkat EPEI). Acemoglu dan Robinson menjelaskan:

*Extractive institutions, by their very logic, must create wealth so that it can be extracted. A ruler monopolizing political power and control of a centralized state and introduce some degree of law and order and a system of rules, and stimulate economic activity. But growth under extractive institutions differs in nature from growth brought forth by inclusive institutions. Most important, it will be not sustained growth that requires technological change, but rather growth based on existing technologies.*³

Di satu sisi, ada upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan, namun di sisi lain diikuti dengan tindakan pengurusan oleh mereka yang berkuasa. Selain memonopoli kekuasaan politik dan pemerintahan, penguasa juga berusaha menegakkan hukum, ketertiban, serta aturan-aturan lainnya dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif bagi perekonomian.

Dalam kasus Sierra Leone, misalnya, Acemoglu dan Robinson menjelaskan bahwa faktor penyebab rendahnya produktivitas di negara itu serta sebagian besar kawasan sub Sahara Afrika adalah perilaku ekstraktif badan pengelola pemasaran dan sistem penguasaan tanah tradisional. Mengutip studi Bates (1980-an) di sub-Sahara Afrika, Acemoglu dan Robinson menyebutkan bahwa penyebab rendahnya produktivitas pertanian di sana bukanlah faktor-faktor geografis, melainkan oleh praktik permainan harga dari badan pengurus pemasaran hasil bumi, dan kemudian membuat petani tidak tertarik berinvestasi.

³ Lihat, Daron Acemoglu dan James A. Robinson. 2012. *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. New York: Crown Business, hlm. 124.

Di dalam EPEI terdapat pula apa yang disebut “*the vicious circle*” (lingkaran setan). Pada kasus Sierra Leone, di mana ia terpuruk karena lingkaran setan. Ketika di bawah kekuasaan Inggris dibangunlah institusi-institusi ekstraktif, dan setelah kemerdekaan pemerintahan baru justru meneruskan sistem tersebut. Negara itu pun tetap berada dalam cengkraman institusi ekstraktif yang tercipta dalam sebuah lingkaran setan. Institusi politik ekstraktif akan memunculkan institusi ekonomi dengan watak serupa yakni memperkaya segelintir orang tetapi menyengsarakan banyak jiwa.⁴ Dikatakan:

*Those who benefit from extractive institutions thus have the resources to build their (private) armies and mercenaries, to buy their judges, and to rig their elections in order to remain in power. They also have every interest in defending the system. Therefore, extractive economic institutions create the platform for extractive political institutions to persist. Power is valuable in regimes with extractive political institutions, because power is unchecked and brings economic riches.*⁵

Jadi, tidak saja memiliki pasukan-pasukan pribadi bahkan tentara bayaran, penguasa – dalam konteks institusi ekstraktif – juga merekayasa pemilihan umum (*election*) untuk mempertahankan kekuasaannya. Berbagai cara dilakukan untuk mempertahankan status quo dan keamanan yang sudah tercipta dan dinikmati selama ini.

Selain tidak menyediakan mekanisme untuk mengontrol penyelewengan kekuasaan, institusi ekstraktif ternyata justru memiliki mekanisme lingkaran setan yang menciptakan kekuasaan tanpa kontrol serta kesenjangan ekonomi luar biasa berikut meningkatkan risiko munculnya permainan politik. Sebab, siapa saja yang menguasai pemerintahan akan menikmati kekuasaan dengan segala kemewahan yang menyertainya.⁶

Pembahasan

Agenda Swasembada Pangan: Hasrat Tak Sampai

Sejak awal kekuasaannya, pemerintahan Joko-JK sering mengungkapkan rencana untuk melakukan dan merealisasikan swasembada pangan. Sering pula dikatakan, dalam lima tahun masa pemerintahannya, Joko-JK menjanjikan Indonesia mampu mencapai swasembada pangan.⁷

Di dalam RPJMN 2015-2019 Bidang Pangan dan Pertanian dikatakan bahwa salah satu sasaran utama prioritas nasional di bidang pangan – untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan – adalah tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi di dalam negeri. Ada program produksi padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, ikan, dan garam. Seiring dengan itu, pemerintah juga mengajukan program pembangunan dan peningkatan layanan jaringan irigasi.⁸ Di akhir 2017, Menteri Pertanian Amran

⁴ *Ibid.*, hlm. 342.

⁵ *Ibid.*, hlm. 343.

⁶ *Ibid.*, hlm. 344.

⁷ Lihat, *Harian Padang Ekspres*. 2014. Edisi 20 November.

⁸ Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas. 2014. *Penyusunan RPJMN 2015-2019 Bidang Pangan dan Pertanian*. Jakarta: Bappenas, hlm. 8.

Sulaiman kembali menggaungkan swasembada pangan komoditas beras, cabai, jagung, dan bawang.⁹

Untuk masa 2015-2019, pemerintah menjanjikan akan menekan bahan pangan impor dan mendorong pasokan pangan dari dalam negeri, menghemat devisa, meningkatkan pendapatan petani dan mempertahankan stabilitas sosial ekonomi dan politik di dalam negeri menuju ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional.¹⁰

Laporan-laporan yang di-*release* pemerintah terlihat capaian-capaian yang cukup mengesankan di bidang pangan. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, misalnya, mengungkapkan jika produksi padi pada 2015 sebesar 75,4 juta ton, maka pada 2016 meningkat menjadi 79,1 juta ton. Pasokan jagung juga mengalami peningkatan menjadi 23,2 juta ton pada 2016, sedangkan pada 2015 hanya sebesar 19,6 juta ton. Begitu pula dengan produksi cabai, komoditi yang kontroversial ini, juga mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan lainnya terjadi pada pasokan daging kambing/domba dan telur unggas. Jagung terjadi penurunan impor, bahkan untuk beras medium tidak impor sama sekali tetapi justru mengekspor beras pada 2016 sebesar 2.506 ton.¹¹

Menurut Kementerian Pertanian, selama 2014-2016, produksi padi meningkat 3,5% per tahun. Kenaikan produksi padi ini setidaknya berimbas pada turunnya harga beras, dan kemampuan Indonesia untuk tidak lagi mengimpor beras dari negara tetangga. Produksi Jagung di tahun 2015 dan 2016 meningkat 7% per tahun. Selama 2014-2015 juga terjadi peningkatan produksi kedelai sebesar 6,8%, daging sapi 17% dan gula meningkat pada 2015-2016 sebesar 12%.¹²

Jika demikian, sesungguhnya terjadi surplus bahan pangan.¹³ Tetapi, benarkah demikian? Apakah angka-angka yang diumumkan pemerintah itu riil, akurat, dan bisa dipercaya?

Hasil Rembuk Nasional Bidang Pangan, pada September 2017, menunjukkan kenyataan yang berbeda dengan apa dikatakan Pemerintah. Misalnya, capaian produksi tinggi versi pemerintah tidak berkorelasi dengan Nilai Tukar Petani (NTP). NTP, sebagai salah satu indikator kesejahteraan petani, justru menurun dari 101,98 (Januari – September 2014) menjadi 100,71 (Januari – September 2017). NTP Tanaman Pangan memiliki nilai terendah dan semakin menurun dari 98,59 menjadi 97,21 di periode yang sama. Tanaman pangan merupakan sektor yang mendapat perhatian utama melalui perlindungan harga serta subsidi terbesar dalam program pembangunan pertanian selama tiga tahun terakhir ini. Jika pemerintah mengklaim kesejahteraan petani meningkat dalam tiga tahun terakhir, itu sulit dipertanggungjawabkan karena tidak benar.¹⁴

Lalu, baik NTP maupun Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) untuk sektor tanaman pangan justru selalu paling rendah dibandingkan

⁹ Lihat, “Lima Fakta Di Balik Keputusan Pemerintah Impor Beras Saat Indonesia Mampu Swasembada” (13/01/2018), dalam *merdeka.com* (diakses 25/01/2018).

¹⁰ Lihat, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2015. *Kebijakan Pembangunan Pertanian: Upaya Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Strategis*. Jakarta: Kementan RI.

¹¹ Darmin Nasution. 2017. “Bangkitnya Pangan Indonesia”, dalam *Geraiinfo Bank Indonesia*, Edisi 62, Tahun VII, hlm. 15-18.

¹² Lihat, Dwi Andreas Santoso, dkk. 2017. *Bidang Rembuk Kedaulatan Pangan dan Mengelola Keamanan Pangan*. tanpa kota, tanpa penerbit, hlm. 36-38.

¹³ *Ibid.*, hlm. 3-4.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

sektor-sektor pertanian lainnya. NTUP perikanan tangkap pada bulan September 2017 tertinggi dengan nilai 123,76 kemudian disusul peternakan (117,23), tanaman hortikultura (112,35), perikanan budidaya (110,54), tanaman perkebunan rakyat (109,43) dan sektor tanaman pangan (106,32).¹⁵

Hasil Rembuk Nasional menunjukkan bahwa hampir semua komoditas yang masuk ke program peningkatan produksi memiliki tingkat akurasi data yang rendah. Perbedaan data produksi padi yang dirilis oleh pemerintah dengan data dari lembaga internasional (FAS-USDA) mencapai 21,5 persen di tahun 2015, 24,3 persen di tahun 2016, dan 28,6 persen untuk tahun 2017. Keputusan maupun kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan data yang salah menyebabkan kegaduhan yang terus berulang. Empat komoditas mengalami kenaikan yang tinggi selama tiga tahun terakhir ini di tengah inflasi yang cukup rendah, yakni daging sapi (16,5%), beras medium (18,9%), gula pasir (19,7%) dan bawang merah (47,8%) yang juga meningkatkan biaya usaha tani.¹⁶

Klaim surplus beras tahun 2017, misalnya, bertolak belakang dengan data peningkatan harga dan impor beras. Klaim surplus jagung, bertolak belakang dengan peningkatan harga jagung rata-rata selama 2014-2017 sekitar 17,9% dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan harga jagung tertinggi di dunia. Bahkan total impor jagung dibanding total konsumsi pada tahun 2015 sudah mencapai 28,7%.¹⁷

Klaim bahwa kita sudah surplus beras atau swasembada beras sangat sulit dipercaya dengan tingginya harga beras di berbagai pelosok Indonesia, dan kenaikan harga beras sudah mulai terlihat sejak Oktober 2017, ujar pakar ekonomi Universitas Indonesia Berly Martawardaya.¹⁸ Hal yang sama juga terjadi pada isu sapi potong. Memasuki tahun 2015 menjadi puncak kegagalan pemerintahan sebelumnya dalam mewujudkan Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) walau selama 2010-2014 telah menyedot dana APBN sekitar Rp 18 triliun. Pada 2015-2016, harga daging sapi berada di atas Rp 100.000/kg.¹⁹

Sementara itu, mutu dan keamanan pangan juga bermasalah. Dari hasil kajian terakhir *Global Food Security Index* (GFSI, September 2017) peringkat mutu dan keamanan pangan Indonesia buruk dan berada pada posisi 86 dari 113 negara. Mutu dan keamanan pangan yang buruk berpotensi besar menurunkan kualitas sumberdaya manusia dan sekaligus peningkatan biaya kesehatan.²⁰

Sesungguhnya kebijakan pangan rezim Joko-JK berjalan tertatih-tatih, namun terlalu berani mengklaim berbagai keberhasilan dengan mengajukan angka-angka statistik yang tidak akurat serta bersimpang jalan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Janji dan agenda rezim Joko-JK untuk bidang pangan terlihat jelas sebagai hasrat tak sampai. Ibarat panggang yang jauh dari api.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 36.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 52-53.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 39-41.

¹⁸ Lihat, "Akademisi Kritik Kebijakan Impor Beras yang Dilakukan Jelang Panen Raya" (19/01/2018), dalam <https://ekonomi.kompas.com> (diakses 25/01/2018).

¹⁹ Dwi Andreas Santoso, dkk. 2017. *Ibid.*, hlm.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

Impor Pangan: Kebijakan Jalan Pintas

Di tengah klaim pemerintah akan capaian dan keberhasilannya meningkatkan produksi pangan, justru kemudian muncul gelombang impor berbagai komoditas pangan seperti beras, gula, garam, dan daging. Pada saat pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Akhir November 2017, Presiden Joko Widodo berucap: "Saya kalau dengar yang namanya impor pangan, itu sedih banget"²¹ menjadi sebuah penjelasan pemerintah yang kemudian tidak bermakna sama sekali. Jauh sebelumnya, rezim Joko-JK berjanji untuk membentuk Bank Tani sebagai upaya menekan impor pangan sekaligus sebagai lembaga keuangan yang menyediakan permodalan bagi petani serta solusi untuk meningkatkan taraf hidup petani,²² hingga saat ini tak ada wujudnya.

Di dalam visi-misi yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum pada masa pencalonan presiden, pasangan Joko-JK dengan tegas menyatakan stop impor pangan khusus untuk beras, jagung, dan daging sapi. Juga, stop impor pangan khusus untuk komoditas kedelai, bawang merah, dan cabai merah.²³

Kehendak swasembada pangan serta ambisi menekan impor pangan tampak kurang seiring dengan kebijakan impor pangan yang dilakukan pemerintah. Swasembada pangan sebagai hasrat tak sampai berujung kebijakan impor. Untuk tahun 2018 saja, impor pangan Indonesia masih tinggi. Impor empat komoditas pangan strategis, yakni beras, gandum, gula, dan kedelai, akan mencapai 19,15 juta ton atau setara US\$ 4,96 miliar tahun ini atau setara Rp 67 triliun.²⁴ Sementara pada 2016, impor beras, jagung, dan gandum saja mencapai 13,20 juta ton, setara US\$ 2,75 miliar atau Rp 36,18 triliun.²⁵

Pada akhir Januari 2018, pemerintah melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam, justru di saat menjelang musim panen. Padahal, tak lama sebelum itu, Mentan Amran Sulaiman meyakini tidak akan ada impor beras hingga April 2018. Sebab, stok beras bisa mencapai 1,74 ton, bahkan pemerintah juga memiliki serapan beras hingga 8 ribu-9 ribu ton per hari.²⁶

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito mengajukan setidaknya empat alasan mengapa pemerintah perlu mengimpor beras: [1] beras yang diimpor itu merupakan beras jenis khusus yang tidak ditanam di dalam negeri; [2] pemerintah hendak menekan tingginya harga beras di pasaran; [3] kebijakan impor ditempuh karena stok beras dalam negeri mulai menipis; dan [4] beras jenis khusus yang diimpor itu digunakan untuk kepentingan komersil seperti di hotel, rumah makan mewah, dan perusahaan catering.²⁷

Oleh Komisi Ombudsman Republik Indonesia, kebijakan impor beras tersebut dinilai sebagai langkah yang tidak tepat, bahkan dikatakan sebagai praktik maladministrasi. Alasannya: [1] penyampaian informasi stok yang tak akurat

²¹ Sebagaimana dilansir *Antara*, 30 November 2017.

²² Lihat, "Lima Janji Jokowi Perbaiki Ekonomi Indonesia Jika Jadi Presiden" (14 Mei 2014), dalam <http://www.merdeka.com>. (diakses, 5 Januari 2018).

²³ Lihat, "Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian: Visi, Misi, dan Program Aksi Jokowi dan Jusuf Kalla 2014", dalam <http://kpu.go.id/> (diakses 5 Januari 2018).

²⁴ Lihat, *Investor Daily*. 2018. Edisi 17 Januari.

²⁵ Lihat, *Investor Daily*. 2016. Edisi 1 April.

²⁶ Lihat, "Lima Fakta di Balik Keputusan Pemerintah Impor Beras Saat Indonesia Mampu Swasembada" (13 Januari 2018), dalam merdeka.com (diakses 25/01 2018).

²⁷ *Ibid.*

kepada publik; [2] pengabaian prinsip kehati-hatian; [3] penggunaan kewenangan untuk tujuan lain; [4] penyalahgunaan kewenangan karena menabrak sejumlah regulasi; [5] prosedur tak patut/pembiaran, misalnya tidak melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan regulasi; dan [6] terjadi konflik kepentingan.²⁸

Sementara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tegas menyatakan bahwa impor beras tersebut tidak berdasarkan data yang valid. BPK mengakui, data kebutuhan dan suplai beras di Indonesia saat ini masih tumpang-tindih. Dari penerbitan persetujuan impor pada 2015 hingga semester I-2017, ditemukan banyak persetujuan impor yang ditetapkan dengan tidak mempertimbangkan jumlah kebutuhan dan produksi nasional.²⁹

Selain beras, pemerintah juga mengimpor gula mentah (*raw sugar*) sebanyak 1,8 juta ton pada semester pertama 2018 untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman.³⁰ Lalu, daging sapi pun impor. Data Statistik Peternakan (2017) menunjukkan, impor daging sapi baik daging beku maupun sapi bakalan yang digemukkan mencapai sekitar 195.764 ton.³¹

Komoditas impor lainnya adalah garam. Sebanyak 3,7 juta ton garam industri per bulan akan diimpor sepanjang 2018. Alasannya, Indonesia belum mampu memproduksi garam industri, sementara kebutuhan garam tersebut cukup tinggi dan terus meningkat terutama untuk perusahaan di bidang petrokimia. Pada 2017, pemerintah mengimpor garam sebanyak 75 ribu ton dari Australia untuk mengatasi kelangkaan garam di sejumlah daerah. Beberapa bulan sebelumnya, kepolisian menangkap Direktur Utama PT Garam dalam kasus dugaan penyalahgunaan izin impor dan distribusi garam industri sebanyak 75.000 ton.³²

Laporan Badan Pusat Statistik (2018) menyebutkan, nilai impor garam industri dari sejumlah negara sepanjang 2017 sebesar US\$ 83,59 juta dengan volume seberat 2,55 juta ton. Sementara sepanjang 2016 impor garam senilai US\$ 86,01 juta. Walau terjadi sedikit penurunan pada 2017, namun dari sisi volume mengalami kenaikan sebanyak 2,14 juta ton.

Perluah impor garam? Di satu sisi, kalangan industri memandang bahwa keputusan pemerintah mengimpor garam sebagai sesuatu yang wajar karena adanya ketimpangan antara produksi dan konsumsi garam nasional.³³ Di sisi lain, kalangan pengamat ekonomi menilai justru pemerintah kurang memiliki keberpihakan kepada petani garam. Peneliti Indef Bhima Yudistira menyebutkan, impor tidak bisa terus dijadikan jalan pintas tanpa solusi jangka panjang. Bukankah pemerintah memiliki Pugar (Program untuk Garam Rakyat), mengapa tidak dioptimalkan? Kalangan industri, memang lebih suka impor karena mata rantai pasokannya ringkas. Kalau membeli produk garam lokal, ada tujuh mata rantai dan tiap mata

²⁸ Komisi Ombudsman Republik Indonesia. 2018. *Gejala Maladministrasi dalam Pengelolaan Data Persediaan Beras Nasional dan Kebijakan Impor Beras*. Jakarta: 15 Januari.

²⁹ Lihat, "BPK Sebut Impor Beras Pemerintah Tak Berdasarkan Data" (21/05/2018), dalam <https://www.viva.co.id> (diakses 22/05/2018).

³⁰ Lihat, merdeka.com

³¹ *Rembuk Nasional ...*, hlm. 68.

³² Lihat, "Indonesia Negara Maritim Tapi Mengapa Harus Mengimpor Garam?" (02/08/2017), dalam <http://www.bbc.com> (diakses, 10 Desember 2017). Juga, merdeka.com (19/01/2018).

³³ Lihat, "Indonesia Negara Maritim Tapi Mengapa Harus Mengimpor Garam?" (02/08/2017), dalam <http://www.bbc.com> (diakses, 10 Desember 2017).

rantai ada biayanya sehingga ketika sampai ke tingkat konsumen menjadi lebih mahal.³⁴

Tetapi menarik, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti justru menyesalkan keputusan pemerintah mengimpor garam. Menteri Menteri Susi, impor garam hingga 3,7 juta ton itu *overrated*. Rekomendasi dari Kemen-KKP adalah pemerintah tidak perlu impor garam industri sebab di dalam negeri produksi garam bagus dan bisa dipakai.³⁵

Menurut catatan Indef, Kementerian Pertanian fokus untuk mengalokasikan anggaran pada program peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai yang menelan porsi 50% dari anggaran Kementan. Jika dibandingkan, total anggaran kedaulatan pangan melonjak hingga 53,2 persen dari Rp 67,3 triliun pada 2014 mencapai Rp 103,1 triliun pada 2017. Bukan hanya itu, anggaran ketahanan pangan juga menyedot anggaran yang cukup besar. Anggaran ini tidak hanya berasal dari Kementan, melainkan juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui program irigasi, kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, dan anggaran non kementerian/lembaga terkait kedaulatan pangan. Anggaran tersebut digunakan untuk peningkatan produksi dan produktivitas pangan yang dialokasikan melalui empat komponen, yaitu Kementan, Kemempupera, subsidi pupuk, dan subsidi benih. Total belanja keempat komponen ini melonjak 61,7% dari Rp 40,2 triliun (2014) menjadi Rp 65 triliun (2017).³⁶

Sementara itu, kinerja sektor perdagangan terus mengalami tren penurunan sejak 2011. Walaupun mencatat nilai surplus dalam empat tahun terakhir, neraca perdagangan Indonesia dinilai masih belum berkualitas. Surplus disebabkan oleh penurunan nilai impor yang lebih drastis dibandingkan pertumbuhan kinerja ekspor. Sepanjang 2016, surplus neraca perdagangan terus melandai karena kinerja ekspor yang terus menurun. Nilai total ekspor Indonesia periode Januari-Oktober 2016 mencapai US\$ 117,09 miliar atau menurun 8,04% dibandingkan periode yang sama tahun 2015. Ekspor non migas tercatat mencapai nilai US\$ 106,37 miliar atau turun 4,65%. Sementara ekspor hasil tambang dan lainnya turun 14,30%, serta ekspor hasil pertanian turun 13,81%.³⁷

Impor pangan yang tinggi dan menunjukkan kecenderungan terus meningkat, memberikan sejumlah isyarat. Pertama, pemerintah memiliki komitmen politik yang rendah untuk meningkatkan produksi pangan. Kedua, di depan publik menyatakan benci impor pangan, namun di belakang meja justru impor menjadi jalan pintas yang harus ditempuh untuk menutupi kegagalan dalam mencapai swasembada pangan dan meraih kedaulatan pangan. Antara panggung depan dan panggung belakang (pinjam tesis Erving Goffman) saling berlawanan, dan negara seperti dijadikan panggung sandiwara saja oleh rezim penguasa saat ini.

³⁴ Lihat, "Indonesia Negara Maritim Tapi Mengapa Harus Mengimpor Garam?" (02/08/2017), dalam <http://www.bbc.com> (diakses, 10 Desember 2017).

³⁵ Lihat, "Kontroversi Impor Pangan di Awal Tahun Politik, Ada Apa?" (23/01/2018), dalam <http://www.republika.co.id> (diakses 4 Februari 2018).

³⁶ Lihat, "Kebijakan Swasembada Pangan Kementan Tak Tepat" (10 Juli 2017), dalam Republika.co.id (diakses 5 Januari 2018).

³⁷ Tim Indef. 2016. *Menguji Ketangguhan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Indef, hlm. 32.

Oleh Siapa dan Untuk Apa?

Banyak pihak yang berkepentingan dengan keputusan pemerintah untuk harus mengimpor pangan. Aktor utama sekaligus yang paling berkepentingan tentu pemerintah sendiri, setidaknya kelompok atau pejabat tertentu di dalamnya. Pelaku bisnis (ekspor-impor maupun bukan), para *broker* (ekonomi dan politik), dan partai politik turut menjadi aktor dalam kebijakan impor pangan. Mereka pula yang mendorong dan turut menciptakan dan merekayasa kondisi yang mendukung lahirnya kebijakan impor pangan tersebut.

Rekayasa politik di balik kebijakan impor pangan untuk tujuan sempit dan pragmatis para aktor merupakan kenyataan yang sulit ditepis. Otoritas yang dimiliki pemerintah untuk membuat kebijakan impor dimanfaatkan sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan (ekonomi dan politik) dan kehendak memburu rente (*rent-seeking*).

Dalam kasus impor beras, misalnya, sesungguhnya bukan beras jenis khusus yang diimpor pemerintah – seperti dikatakan Mendag Lukito Enggartiasto – melainkan beras umum. Pakar pangan dari IPB Bogor Profesor Dwi Andreas Santoso secara tegas menyebutkan bahwa itu bukan beras khusus, tetapi beras biasa atau beras umum yang selama ini sering diimpor untuk menstabilkan pasar. Beras umum yang diimpor itu berada kisaran harga US\$ 350 sampai US\$ 450 juta per ton. Sementara beras khusus yang beredar hanya 5-10% dari total stok beras Indonesia dengan harga US\$ 800 sampai US\$ 900 juta per ton. Jika yang diimpor beras biasa, pemerintah diperkirakan mendapatkan keuntungan Rp 1,5 triliun untuk 500 ribu ton beras impor yang seharga US\$ 300 juta per ton.³⁸

Profesor Dwi juga mempertanyakan mengapa pemerintah (dalam hal ini Kementerian Perdagangan) menunjuk perusahaan BUMN yakni PT PPI (Persero) sebagai importir beras dari Vietnam dan Thailand itu. PT PPI tidak memiliki wewenang sekaligus infrastruktur memadai untuk impor beras demi kepentingan umum. Kewenangan tersebut seharusnya dijalankan Perum Bulog sebagaimana diatur dalam Permendag No. 1/2018.³⁹

Untuk siapa keuntungan besar yang didapat pemerintah dari impor beras 500 ribu ton itu? Pakar ekonomi Rizal Ramli tanpa ragu mengatakan bahwa keuntungan tersebut merupakan komisi besar yang diburu dan didapat oleh pejabat yang melakukan impor beras. Menurutnya, dalam sejarah politik Indonesia, uang paling mudah diperoleh dari impor komoditi. Untuk itu, para aktor bermainnya di komoditas gula, beras, kedelai, dan daging. Uang yang beredar di dalamnya gampang untuk di-*colong*. "Pengalaman saya saat di Bulog, Kementerian Perdagangan maunya impor saja karena ada komisi US\$ 20-30 dolar per ton. Transaksinya semua di luar negeri, akun banknya juga di luar negeri."⁴⁰

Jika Komisi Ombudsman melihat ada konflik kepentingan dalam impor beras 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand dengan penunjukan PT PPI⁴¹, maka bagi Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo bahwa impor beras itu selain

³⁸ Lihat, "Di Balik Kebijakan Impor Beras 500 Ribu Ton" (13/01/2018), dalam <http://www.ekonomi.metrotvnews.com> (diakses, 04/02/2018).

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Lihat, "Rizal Ramli: Ada Komisi Besar untuk Pejabat yang Impor Beras" (12/01/2018), dalam <http://nusantara.rmol.co> (diakses 25/01/2018).

⁴¹ Lihat, "Ombudsman Pertanyakan Siapa yang Dapat Untung dari Impor Beras" (15/01/2018), dalam <https://nasional.kompas.com> (diakses 25/01/2018).

bertentangan dengan UU Pangan, juga ada indikasi *kongkalikong* di dalamnya. Menurut Firman, per Januari 2018 stok beras masih ada di mana-mana. Stok pangan nasional lebih dari cukup. Bahkan harga beras menjelang Natal dan tahun baru juga terkendali. Firman melihat terdapat kejanggalan dalam kebijakan impor beras tersebut, di mana kebijakan diambil setelah melakukan rapat dengan para pelaku pasar dan tengkulak. Padahal semua juga tahu bahwa mereka itulah yang selama ini menjadi mafia pangan. Rapat koordinasi Kementerian Perdagangan seharusnya dengan Kementerian Pertanian, bukan dengan pelaku bisnis dan para tengkulak.⁴²

Apa yang yang dikatakan Rizal Ramli soal komisi besar bagi pejabat serta indikasi kongkalikong yang disinyalir Firman bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Banyak kasus dalam kebijakan impor pangan sebelumnya yang mendukung pernyataan itu. Sebutlah satu di antaranya kebijakan impor gula rafinasi pada 2016 yang menjerat Ketua DPD Irman Gusman (ketika itu) dalam lingkaran suap-menyuap. Juga, sebelumnya kasus impor sapi dan/atau daging sapi yang kemudian mengantarkan Anggota DPR Luthfi Hasan Ishaq ke hotel prodeo.

Persekongkolan atau *kongkalikong* itu bisa terjadi antara lain karena berlakunya sistem kuota dalam impor pangan. Pengamat pangan Syarkawi Rouf menyebutkan, sejak awal, rezim kuota impor berpotensi melahirkan masalah hukum, baik dari aspek pidana maupun hukum persaingan usaha. Secara pidana, rezim kuota dapat memfasilitasi persekongkolan antara pemberi kuota dan calon penerima kuota. Sementara dari sisi hukum persaingan usaha, rezim kuota berpotensi memfasilitasi terjadinya praktik kartel, yaitu persekongkolan antarpelaku usaha dalam menetapkan harga dan mengatur pasokan ke pasar. Praktik korupsi (suap) dalam rezim kuota impor sangat mudah terjadi karena hampir semua komoditas pangan memiliki disparitas harga yang tinggi antara harga dalam negeri dan harga internasional.⁴³

Rezim kuota impor, lanjut Syarkawi, menyebabkan kelangkaan dan persistensi kenaikan harga komoditas pangan di dalam negeri. Hal ini disebabkan rendahnya akurasi data produksi (pasokan) dan konsumsi. Tingkat akurasi data yang buruk menyebabkan *overestimate* (kelebihan hitung) dalam menentukan produksi dalam negeri. *Overestimate* menghitung produksi pangan menyebabkan lemahnya akurasi data pasokan pangan nasional. Implikasinya, terjadi *underestimate* (kekurangan hitung) dalam menetapkan kuota impor. Pengalaman menunjukkan, realisasi impor pangan selalu lebih rendah daripada besarnya kuota yang diberikan berimplikasi pada kelangkaan dan tingginya harga pangan di dalam negeri.⁴⁴

Menariknya, impor pangan tidak hanya berdimensi perburuan rente, melainkan juga sengaja dilakukan untuk kepentingan pemilihan umum. Itulah yang diintrodusir oleh pengamat pangan dan pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori. Menurutnya, impor (khususnya beras) guna meredam kenaikan harga sudah sangat terlambat. Tetapi pemerintah merasa perlu melakukannya. Mengapa? Keputusan ini ada hubungannya dengan pemilu. Beras impor masuk mulai akhir Januari 2018. Kemudian, pemerintah mengestimasi

⁴² Lihat, "Politisi Golkar: Impor Beras Tak Sejalan dengan Nawacita Jokowi" (12/01/2018), dalam <https://nasional.kompas.com> (diakses 25/01/2018).

⁴³ Lihat, Muhammaad Syarkawi Rouf. 2016. "Korupsi dan Kartel dalam Rezim Kuota", dalam Harian *Kompas*, edisi 21 September.

⁴⁴ *Ibid.*

bahwa pada awal Februari 2018 akan terjadi panen raya. Hal ini berpotensi menekan harga gabah dan beras jauh lebih dalam. Impor itu bukannya rugi, melainkan untung. Kepentingan politiknya terletak di sini; ada peluang mencari dana segar untuk kepentingan politik.⁴⁵

Jika demikian adanya, sungguh mengindikasikan bahwa pola-pola politik ekstraktif – seperti dikemukakan Acemoglu dan Robinson – terjadi dalam konteks kebijakan pangan. Di satu sisi, ada upaya-upaya sistematis dari pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan di masyarakat, termasuk dengan melakukan impor. Namun, di sisi lain, pemerintah atau badan tertentu dari pemerintah yang menangani urusan pangan berusaha memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk mengambil keuntungan ekonomi dari kebijakan pangan yang dilakukan, terutama dari kran impor. Apa yang dikatakan Acemoglu dan Robinson bahwa institusi politik ekstraktif justru memunculkan institusi ekonomi dengan watak buruk yakni memperkaya segelintir orang tetapi menyengsarakan banyak jiwa, sungguh telah terjadi di negeri ini. Mereka (yang berkuasa) juga melakukan pengurusan-pengurusan sumberdaya.

Jika faktor cuaca dijadikan variabel penyebab oleh pemerintah soalnya rendahnya produksi pangan dalam negeri, hal ini serupa atau dapat dianalogikan dengan apa yang dikatakan Bates – yang dikutip Acemoglu dan Robinson – bahwa faktor penyebab rendahnya produktivitas pertanian sesungguhnya bukanlah faktor-faktor geografis, melainkan oleh praktik permainan harga dari badan-badan pemerintah. Apa yang dikatakan konsultan bidang pangan dan pertanian McMahon, mungkin sedikit banyak berkorelasi dengan itu. Menurutnya, sampai abad ke-21 saat ini, himpunan karya sistem pangan dunia dibuat semakin ruwet oleh sistem perdagangan internasional. Negara-negara memainkan peran yang saling berbeda dan seringkali justru mengagetkan, lebih banyak ditentukan oleh pilihan-pilihan politik dan ekonomi selain geografi.⁴⁶

Relatif jelas sebetulnya dimensi politik dalam kebijakan impor pangan pemerintahan Joko-JK, dalam tiga tahun terakhir ini. Aktor-aktor yang berkepentingan dengan itu hadir untuk memeberikan penguatan. Dalam konteks ini, sangat terasa pula ada indikasi terjadi seperti “jeruk minum jeruk” dalam impor pangan. Acemoglu dan Robinson menyebutnya sebagai mekanisme lingkaran setan (*the vicious circle*) yang potensial menciptakan kekuasaan tanpa kontrol serta kesenjangan ekonomi yang besar.

Penutup

Dari penjelasan-penjelasan di atas, beberapa kesimpulan dapat dikemukakan pada bagian akhir ini. Kehendak swasembada pangan rezim Joko-JK yang tak kunjung berwujud, antara lain disebabkan oleh buruknya perencanaan disertai ketidakseriusan pemerintah untuk membangun kemandirian di bidang pangan. Apa yang dijanjikan di masa kampanye nyaris semuanya diingkari. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan pangan sekaligus untuk mengatasi kegagalannya dalam meningkatkan produksi pangan dalam negeri, pemerintah pun menempuh kebijakan impor. Berbagai jenis pangan seperti beras, gula, kedelai, garam, daging

⁴⁵ Lihat, “Impor Beras Bukti Kedaulatan Pangan Telah Gagal” (30/01/2018), dalam <https://nusantara.news> (diakses 4 Februari 2018).

⁴⁶ Lihat, Paul McMahon. 2017. *Berebut Makan: Politik Baru Pangan* (terjemahan). Yogyakarta: Insist, hlm. 27.

sapi, dan lain-lain diimpor, meskipun Indonesia sangat potensial untuk surplus berbagai jenis pangan tersebut.

Ironisnya, pemerintah begitu bersemangat mengumumkan capaian-capaian fantastik di bidang pangan dengan menyodorkan angka-angka statistik yang gemuk. Hanya saja, angka-angka itu diragukan bahkan dibantah sejumlah kalangan – termasuk oleh lembaga negara – karena tidak berkorelasi dengan kenyataan di lapangan. Justru, misalnya, memunggungi tingkat kesejahteraan petani dan tidak seiring dengan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) untuk sektor tanaman pangan.

Kebijakan impor pangan yang tidak selalu ditopang data yang kredibel, malah cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu sekaligus kepentingan ekonomi kelompok tertentu. Tidak menutup kemungkinan juga untuk mengumpulkan logistik dalam rangka kompetisi pada Pemilu dan Pilpres 2019. Jika demikian, sesungguhnya kebijakan tersebut dirancang bukan kepentingan publik (memenuhi kebutuhan pasar), melainkan untuk kepentingan pelanggaran kekuasaan rezim itu sendiri. Sekali lagi, jika demikian, negara (rezim penguasa) seolah telah menjadi predator (pinjam istilah Galbraith)⁴⁷ terhadap rakyatnya sendiri.

Pola-pola kebijakan yang ekstraktif (*extractive institutions*) pemerintah di bidang pangan selain menunjukkan bahwa perilaku rezim penguasa saat ini memiliki kesamaan dengan rezim-rezim sebelumnya, juga menjadi penjelasan mengapa pemenuhan kebutuhan pangan mengalami kegagalan serta upaya mengangkat derajat pertanian di negeri ini terasa begitu berat nyaris mustahil. Kebijakan pangan tidak untuk fokus menarik garis lurus ke titik kesejahteraan masyarakat melainkan lebih untuk menguras sumberdaya dalam rangka menumpuk energi (politik dan ekonomi) rezim penguasa serta segelintir kelompok tertentu yang berada di sekitar lingkaran kekuasaan.

Beberapa rekomendasi dapat dikemukakan. Pertama, pemerintah – dalam konteks ini rezim Joko-Jk – mesti konsisten mewujudkan janji-janji kampanyenya, khususnya di bidang pangan dan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Kedua, kebijakan pangan mesti diorientasikan untuk kesejahteraan rakyat bukan menjadi instrumen untuk tukar-menukar dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki untuk melayani kepentingan kelompok tertentu dan rezim penguasa semata. Ketiga, impor – jika harus dilakukan – lebih dilakukan berdasarkan kebutuhan riil, bukan dalam rangka perburuan rente (*rent-seeking*). Keempat, pemerintah saat ini sebaiknya berusaha keras untuk tidak meneruskan pola-pola politik ekstraktif dalam kebijakan ekonomi yang hanya menguntungkan elite penguasa namun merugikan rakyat. *Wallahu'alam.* []

Daftar Referensi

Buku

Acemoglu, Daron dan James A. Robinson. 2012. *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. New York: Crown Business.

⁴⁷ Lihat, James K. Galbraith. 2008. *The Predator State: How Conservatives Abandoned the Free Market and Why Liberals Should Too*. New York: Free Press.

- Galbraith, James K. 2008. *The Predator State: How Conservatives Abandoned the Free Market and Why Liberals Should Too*. New York: Free Press.
- Geoff Hiscock. 2012. *Earth Wars: The Battle For Global Resources*. Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd.
- McMahon, Paul. 2017. *Berebut Makan: Politik Baru Pangan* (terjemahan). Yogyakarta: Insist Santoso, Dwi Andreas, dkk. 2017. *Bidang Rembuk Kedaulatan Pangan dan Mengelola Keamanan Pangan*. tanpa kota, tanpa penerbit.

Laporan Penelitian

- Tim Indef. 2016. *Menguji Ketangguhan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Indef.

Artikel

- Nasution, Darmin. 2017. "Bangkitnya Pangan Indonesia", dalam *Geraiinfo Bank Indonesia*, Edisi 62, Tahun VII, hlm. 15.
- Rouf, M. Syarkawi. 2016. "Korupsi dan Kartel dalam Rezim Kuota", dalam *Harian Kompas*, edisi 21 September.
- Segara, Tirta. 2017. "Inisiatif Membangun Ketahanan Pangan Nasional", dalam *Geraiinfo Bank Indonesia*, Edisi 62, Tahun VII, hlm. 4-5.

Dokumen Pemerintah

- Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas. 2014. *Penyusunan RPJMN 2015-2019 Bidang Pangan dan Pertanian*. Jakarta: Bappenas RI.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2015. *Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian*. Jakarta: Kemenko Perekonomian RI.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2015. *Kebijakan Pembangunan Pertanian: Upaya Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Strategis*. Jakarta: Kementan RI.
- Komisi Ombudsman Republik Indonesia. 2018. *Gejala Maladministrasi dalam Pengelolaan Data Persediaan Beras Nasional dan Kebijakan Impor Beras*. Jakarta: 15 Januari.

Media Cetak

- Harian Padang Ekspres*. 2014. Edisi 20 November.
- Investor Daily*. 2016. Edisi 1 April.
- Investor Dailay*. 2018. Edisi 17 Januari.

Sumber Online

- "A Catch-22 from China that could derail Indonesia's Widodo" (12 May 2018), dalam <http://www.scmp.com/week-asia/politics> (diakses 14 Mei 2018).
- "Akademisi Kritik Kebijakan Impor Beras yang Dilakukan Jelang Panen Raya" (19/01/2018), dalam <https://ekonomi.kompas.com> (diakses 25/01/2018).
- Antara*, 30 November 2017.
- "BPK Sebut Impor Beras Pemerintah Tak Bedasarkan Data" (21/05/2018), dalam <https://www.viva.co.id> (diakses 22/05/2018).
- "Defisit Pangan US\$ 9,2 M", dalam <http://www.kemenperin.go.id>, (diakses 5 Januari 2018).

- “Di Balik Kebijakan Impor Beras 500 Ribu Ton” (13/01/2018), dalam <http://www.ekonomi.metrotvnews.com> (diakses, 04/02/2018).
- “Impor Beras Bukti Kedaulatan Pangan Telah Gagal” (30/01/2018), dalam <https://nusantara.news> (diakses 4 Februari 2018).
- “Indonesia Negara Maritim Tapi Mengapa Harus Mengimpor Garam?” (02/08/2017), dalam <http://www.bbc.com> (diakses, 10 Desember 2017). Juga, merdeka.com (19/01/2018).
- “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian: Visi, Misi, dan Program Aksi Jokowi dan Jusuf Kalla 2014”, dalam http://kpu.go.id/visi_misi_Jokowi-JK (diakses 5 Januari 2018).
- “Kebijakan Swasembada Pangan Kementan Tak Tepat” (10 Juli 2017), dalam Republika.co.id (diakses 5 Januari 2018).
- “Kontroversi Impor Pangan di Awal Tahun Politik, Ada Apa?” (23/01/2018), dalam <http://www.republika.co.id> (diakses 4 Februari 2018).
- “Lima Fakta Di Balik Keputusan Pemerintah Impor Beras Saat Indonesia Mampu Swasembada” (13/01/2018), dalam merdeka.com (diakses 25/01/2018).
- “Lima Janji Jokowi Perbaiki Ekonomi Indonesia Jika Jadi Presiden” (14 Mei 2014), dalam <http://www.merdeka.com>. (diakses, 5 Januari 2018).
- “Ombudsman Pertanyakan Siapa yang Dapat Untung dari Impor Beras” (15/01/2018), dalam <https://nasional.kompas.com> (diakses 25/01/2018).
- “Politisi Golkar: Impor Beras Tak Sejalan dengan Nawacita Jokowi” (12/01/2018), dalam <https://nasional.kompas.com> (diakses 25/01/2018).
- “Rizal Ramli: Ada Komisi Besar untuk Pejabat yang Impor Beras” (12/01/2018), dalam <http://nusantara.rmol.co> (diakses 25/01/2018).